

PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM: TINJAUAN EPISTEMOLOGI

Oleh: Usman Abu Bakar*

Abstract

The article elaborates the paradigm of Islamic education from epistemological perspective. In fact, the development of technology, information and free trade has been as problems in the globalization era. The condition appears anxiety toward the existence of Indonesian education in preparing competitive human resources. Indonesian Education is still trapped by dichotomy between religious science and secular one. In the globalization era, however, the dichotomy is not popular anymore and the separation is one of some factors that makes Indonesia left behind other countries.

The emergence of the Acts No. 20 of 2003 concerning National Educational System is truly an attempt of Indonesian country to reach equality among countries in the world. Thus, the Islamic concept of nondichotomic education finds its significance. In terms of Islamic contexts, it is necessary to reformulate the paradigm of science that underlines all educational system in order to fulfill the demand of society and era.

مستخلص

تطرح الدراسة إشكالية الفصل التعسفي بين العلم والدين في منظومة التربية الإندونيسية، وذلك في ظل أجواء تنافسية عالية تسببها ظاهرة العولمة؛ تلك الأجواء التي تقلل من الفرص التي يحصل عليها المتخرجون من التعليم الديني. ومن خلال تعرضها للمنظومة القانونية التي تنظم عملية التربية والتعليم الإندونيسية، وعلى رأسها القانون رقم 20 لعام 2003، تقدم الدراسة رؤية أصبحت ضرورية لبناء نموذج تربوي معرفي يتكامل فيه البعد العلمي والبعد الديني بغير تفريق. إن بناء نموذج كهذا من

* Dosen STAIN Surakarta. Email: amri_syarif@yahoo.com

شأنه أن يسارع من تجاوب الإنسان الإندونيسي مع المتغيرات المعاصرة بشكل أكثر نجاحاً وأكثر تكاملاً.

Keywords: Paradigma Pendidikan Islam, Globalisasi, dan Sistem Pendidikan

A. Pendahuluan

Wacana tentang peningkatan mutu pendidikan Islam kembali menghangat belakangan ini terkait dengan upaya pemerintah untuk mensejajarkan mutu pendidikan Islam dengan pendidikan umum pada semua level dan jenjang pendidikan. Hal itu sebagai dampak dengan telah ditetapkan Undang-undang No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional (UUSPN) yang mengakui pendidikan keagamaan sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional yang berhak mendapat perlakuan sama dan sejajar dengan pendidikan umum.

Namun dalam tataran realitas kebijakan dan program peningkatan kualitas pendidikan Islam masih perlu diperjuangkan lagi secara lebih aktual dengan alasan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam masih marjinal dan terdiskrimasi dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Di sisi lain, proses globalisasi yang semakin meningkat dalam dasawarsa terakhir telah menghadirkan tantangan baru bagi lembaga-lembaga pendidikan nasional tidak terkecuali pendidikan Islam.

Era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi dan informasi dan perdagangan bebas antar negara telah menjadi problematika sendiri bangsa kita untuk segera dirumuskan kebijakannya. Apalagi dengan telah disepakatinya kesepakatan-kesepakatan internasional perdagangan bebas dunia dalam AFTA/NAFTA dan yang terakhir para anggota WTO telah menyepakati GATS (*General Agreement on Trade in Service*) yaitu perdagangan bebas di bidang jasa dimana pendidikan menjadi salah satu sektor bisnis jasa yang harus dibebaskan.

Kekhawatiran yang sering muncul dari adanya perkembangan dunia tersebut adalah sudah siapkah pendidikan kita menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi/kompetitif, padahal dari segi mutu dan kualitas pendidikan kita masih jauh di bawah bangsa lain dan negara ASEAN¹.

¹ Lihat hasil survei dari lembaga-lembaga internasional dan nasional seperti UNESCO, UNDP, World Bank, BPS serta lembaga survei independen seperti HDI (Human Development Index) yang dilihat dari berbagai faktor hasilnya selalu menempatkan posisi pendidikan kita pada ranking di bawah Vietnam. Baca Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional : Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi* (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009) cet I, hal. 28-29.

Melihat dari substansi UUSPN, sesungguhnya merupakan jawaban dari upaya bangsa kita untuk mengejar ketinggalan dengan bangsa lain tersebut. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana upaya mengaktualisasikan UU tersebut dalam kehidupan pendidikan nasional masih perlu perjuangan dan keseriusan banyak pihak tidak hanya para pemerhati pendidikan, politisi dan akademisi namun perlu *good will* dari seluruh elemen bangsa.

Padahal di sisi lain tantangan internal dunia pendidikan kita tengah dihadapkan pada dua sisi persolan yang belum terselesaikan yaitu memperbaiki mutu/kualitas pendidikan dalam menghadapi globalisasi dan masih adanya dualisme sistem pendidikan yang sama-sama sebagai sub sistem pendidikan nasional (pendidikan umum dan agama) yang telah dijamin kesetaraannya oleh UUSPN. Tantangan eksternal yang juga harus segera diselesaikan adalah bagaimana sistem pendidikan kita mampu menjawab dan menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tuntutan global, yaitu SDM yang berkualifikasi dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Pemberlakuan UUSPN sebenarnya merupakan masa yang penuh peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan Islam. Peluang, karena kita menyaksikan semakin meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada pendidikan yang berbasis agama Islam dikalangan masyarakat muslim sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi dalam konteks budaya dan moralitas. Sementara tantangannya adalah pendidikan Islam harus mampu merespon tuntutan masyarakat tersebut agar tidak menjadi pendidikan yang nomer dua atau dinomerduakan bahkan menjadi pendidikan pilihan utama. Untuk itu, pendidikan Islam harus mampu memformulasi paradigma pendidikannya yang sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat kita dan masyarakat dunia.

B. Globalisasi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Islam

Globalisasi yang telah menemukan momentumnya sejak dua dasawarsa terakhir telah menjadi diskursus banyak kalangan tidak terkecuali kalangan pendidikan. Diskursus globalisasi yang sering dibahas adalah bersatunya berbagai negara dalam satu entitas dimana batas-batas negara secara fisik-geografi sudah tidak penting lagi karena sebagai akibat dari berbagai penemuan dalam bidang teknologi informasi, kekuasaan suatu negara dalam arti teritorial menjadi semakin kabur sehingga faktor yang paling penting bagi eksistensi suatu bangsa adalah dikuasainya teknologi informasi.

Di sisi lain, teknologi informasi juga telah memasuki ranah pembelajaran diri dalam suatu proses pendidikan yang bersifat maya (*virtual*). Sebagai implikasinya pendidikan nasional harus mampu mempersiapkan bangsa ini menjadi komunitas yang terberdayakan dalam menghadapi kehidupan global yang semakin lama semakin menggantungkan diri pada teknologi informasi. Salah satu ciri masyarakat yang terberdayakan oleh sistem pendidikan ialah dimilikinya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam konteks global.

Tantangan global di atas harus mampu dibaca sebagai sebagai sebuah peluang untuk mereformulasi sistem pendidikan nasional yang adaptif yang berwawasan global. Dalam konteks pendidikan nasional UUSPN No 20/2003 adalah merupakan jawaban atas tuntutan global tersebut, sekalipun dalam tataran implementatifnya masih jauh yang diharapkan undang-undang tersebut. Menurut UUSPN pendidikan keagamaan telah diakui sejajar dengan pendidikan (umum) lainnya yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sekalipun masih menyisahkan masalah klasik lagi yaitu dualisme-dikhotomi pendidikan dimana pendidikan agama hanya dikhususkan menyelenggarakan pendidikan yang tujuannya menyiapkan peserta didik agar dapat mamahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya dan atau menjadi ahli agama.

Pendidikan nasional masih tetap berjalan dalam dua sisi yang berbeda, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Padahal, pendidikan dalam konteks global tidak mengenal dikhotomi ilmu melainkan kualifikasi dan kompetensi keilmuan. Pemilahan pendidikan semacam ini sebenarnya akan menjadi masalah tersendiri dikemudian hari, mengingat dampak sekarang yang telah ditimbulkannya pendidikan umum mempunyai peluang yang lebih besar daripada mereka yang berpendidikan keagamaan dalam mencari kehidupan. Kesetaraan yang dijamin oleh UUSPN hanya akan menyisahkan problem nasional dikemudian hari, apalagi dalam penyerapan dunia kerja dalam negeri masih dirasakan diskriminatif.

Hal ini berdampak pada dunia pendidikan agama (Islam) dalam sistem pendidikan nasional masih dalam posisi yang marjinal. Marjinalisasi pendidikan Islam ini akibat dari masih kuatnya pemahaman perbedaan paradigma keilmuan keduanya dan pewarisan sejarah pendidikan Indonesia. Pendidikan Islam lahir dari pendidikan agama yang awal dari pesantren yang hanya berfokus pada mempelajari ilmu-ilmu agama Islam sebagaimana yang telah dipraktekkan dalam pendidikan timur tengah. Kemudian pada masa penjajahan kolonial sengaja tampil memisahkan dan mengisolasi diri sebagai bentuk perlawanan secara diam (*silent opposition*) terhadap pendidikan kolonial yang pada akhirnya memposisikan diri hanya pada

pendidikan agama². Sementara pendidikan kolonial yang mengusung sistem dan metode keilmuan barat yang berparadigma rasional-empirisme justru pada masa perkembangan di Indonesia mendapatkan tempat tersendiri dan diadopsi dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Islam tampil menjadi bagian dalam sistem pendidikan nasional baru muncul pada tahun 50-an dan 60-an dengan berbagai dinamika politik yang masih kurang menguntungkan bagi pengembangan pendidikan Islam ditambah lagi hubungan yang kurang mulus antarumat Islam dengan penguasa Orde Baru pada masa itu membuat lembaga pendidikan Islam berada dalam posisi yang tetap termarjinalkan.³ Dan gambaran perbedaan paradigma ilmu keduanya telah mengantarkan pada stereotip kelembagaan atau pergulatan identitas yang terus menerus berlanjut sampai sekarang.

Memasuki era reformasi yang ditandai terbukanya struktur kehidupan politik. Upaya memperbaharui sistem pendidikan nasional dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa di mata dunia terus menguat seiring kuatnya arus globalisasi sehingga harus segera ada upaya menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan dunia global. Mengingat kecepatan merespon dinamika global akan menjadi faktor determinan eksistensi sebuah negara dalam sebuah lingkungan *global state* yang tidak mengenal batas geografis (*borderless*) akibat kemajuan teknologi informasi.⁴

Respon globalisasi tersebut diwujudkan dengan telah terumuskannya paradigma baru pendidikan nasional yang berprinsip global. Asumsi dasar yang dipakai paradigma ini adalah perkembangan peradaban manusia dimana ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor penggerak arus globalisasi, harus dimulai dari sektor pendidikan, yaitu menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan sains dan teknologi yang handal. Asumsi lainnya adalah watak globalisasi yang provan-materialistik

² Azyumardi Azra, "Pendidikan Islam di Era Globalisasi : Peluang dan Tantangan", makalah disampaikan dalam *Annual Conference on Islamic Studies* (ACIS) ke-7 di Pekanbaru, 21-24 November 2007, hal. 2.

³ Meskipun sejak tahun 1970-an sebagai konsekuensi pembagunan nasional yang dicanangkan pemerintahan orba, pendidikan Islam mau tidak mau harus ikut dimodernisasi berdasarkan SKB tiga Menteri (Menag, Menteri P&K dan Mendagri) No 6/1975 menempatkan jenjang pendidikan Islam termasuk didalamnya madrasah dan pesantren dalam semua jenjang sama posisinya dengan pendidikan umum. SKB Tiga Menteri ini telah menjadi tonggak sejarah dalam integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional yang kemudian dikukuhkan lagi dalam UUSPN 1989 yang menetapkan pendidikan Islam ekuivalen dengan pendidikan umum. Azumardi, *Ibid.*, hal. 3-4.

⁴ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), hal. 16.

ternyata secara massif bergerak menuju sekularisasi nilai-nilai agama dan budaya, sehingga tidak aneh apabila nantinya akan terjadi penjajahan gaya baru dari penjajahan fisik-ideologi menjadi penjajahan budaya dan informasi. Melawan penjajahan gaya baru ini, tidak bisa tidak, hanya dapat dilawan dengan pendidikan yang berparadigma *value bond* dan holistik.

Paradigma pendidikan yang *value bond* adalah pendidikan yang berangkat dari satu pemikiran bahwa pendidikan merupakan suatu upaya pewarisan nilai yang akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sekaligus dalam memperbaiki kondisi dan peradaban umat manusia. Karena maju mundurnya peradaban manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterapkan oleh suatu bangsa tadi. Dalam konteks global kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sejauhmana bangsa tadi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditopang dengan nilai-nilai moral dan agama.

Namun demikian, paradigma pendidikan nasional kita yang mengakui perlu adanya pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikannya sebagai upaya membendung globalisasi tetap saja masih belum menyadari bahwa adanya dualisme dalam paradigma pendidikannya, yaitu: pertama, pendidikan agama tetap ditempatkan dalam ranahnya khusus sebagai wadah pengkajian ilmu-ilmu agama dalam porsi yang lebih besar sementara ilmu-ilmu umum diajarkan hanya sebagai penambah pengetahuan. Kedua, pendidikan Islam menengah hanya disederajatkan dengan pendidikan menengah umum yang artinya belum adanya pengakuan yang bulat dari sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan agama (Islam) sama kedudukan dan haknya dalam pendidikan nasional. Konsekuensi logis atas kebijakan dikhotomi tersebut adalah pengelolaan pendidikan dilakukan oleh dua departemen (Depdiknas untuk pendidikan umum dan Depag untuk pendidikan agama) yang dalam praktiknya alokasi anggaran pendidikan agama jauh lebih kecil dibanding pendidikan umum.

Dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang globalisasi diatas yang harus direspon sebenarnya adalah melakukan mereformulasi satu sistem pendidikan nasional dari paradigma dikhotomik menjadi paradigma intergralistik artinya bahwa sistem pendidikan nasional hanya mengenal satu paradigma pendidikan nasional tidak dibeda-bedakan lagi adanya pendidikan umum dan agama. Mencapai keinginan tersebut tentulah tidak semudah mengatakan. Hal ini disebabkan karena menjadikan pendidikan Islam diakui bahkan dianggap sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan nasional dalam tataran praktis bukan normatif masih terkendala aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan birokrasi yang lagi-lagi masih kental nuansa dikhotomik.

Sebagai solusinya harus adanya upaya politik penyadaran secara kolektif bahwa pendidikan harus dikonseptualisasikan sebagai suatu usaha dan proses pemberdayaan yang perlu dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah dalam rangka melakukan investasi masa depan bangsa, bukan sekadar upaya tambal sulam program yang tidak akan mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa akan menjadi realitas dalam kebijakan dan praksis jika masyarakat, keluarga, dan pemerintah secara bersama memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pencarian solusi bagi semua persoalan dan tantangan pendidikan yang kita hadapi saat ini dan masa-masa yang akan datang. Interdependensi kehidupan menuntut adanya saling percaya (*mutual trust*) di antara sesama manusia. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus mampu menanamkan nilai-nilai (*values*) kepada seluruh lapisan masyarakat agar memiliki sikap hidup yang toleran, saling mempercayai satu sama lain, sehingga pada akhirnya masyarakat kita memiliki kemampuan untuk hidup dalam berbagai bentuk pluralitas kehidupan.

Namun penyadaran kolektif masih butuh banyak waktu sementara dinamika tuntutan masyarakat dan zaman terus mengkat nampaknya memodernisasi pendidikan Islam sudah menjadi keharusan sejarah. Apalagi situasi sosiologis umat Islam yang sudah mulai bergeser kepada pentingnya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai agama terus meningkat, maka sepanjang tahun 1990-an banyak muncul eksperimen-eksperimen baru pendidikan Islam yang mencoba menjawab tuntutan zaman yaitu kualitas pendidikan yang memadukan ilmu umum dan agama yang dilakukan lembaga pendidikan swasta. Sementara lembaga pendidikan Islam negeri masih terikat oleh aturan perundang-undangan sehingga masih bertahan pada posisinya.

Untuk itu, yang harus segera dilakukan bukanlah menerima kondisi yang ada dan berwacana idealisme, melainkan harus melakukan pembenahan pendidikan Islam secara sistematis dan substantif terhadap semua komponen dalam sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus dibedah secara komprehensif terhadap semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan mulai dari reorientasi paradigma pendidikan Islam, restrukturisasi sistem dan kelembagaan sampai pada rekonseptualisasi epistemologi ilmu yang nantinya akan berdampak pada perubahan dan pengembangan kurikulum yang berbasis paradigma pendidikan Islam.

C. Paradigma Pendidikan Islam: Pembentukan Pribadi Berkarakter Abdullah Dan Khalifatullah

Menurut Hills paradigma diartikan sebagai *type of something, model, and pattern* yang secara terminologi berarti *a total view of problems; a total outlook of somethings*⁵ atau cara pandang dan cara berpikir yang menyeluruh terhadap sesuatu, maka kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam dapat diartikan sebagai cara pandang Islam yang menyeluruh terhadap pendidikan sebagai sebuah sistem yang menyangkut konsep, sistem dan kelembagaan, kurikulum pendidikan dan manajemen pendidikan Islam.

Dalam tulisan ini paradigma pendidikan Islam akan ditinjau secara epistemologis sebagai dasar atau basik pengembangan yang harus dijadikan acuan bagi pengembangan pendidikan Islam selanjutnya. Hal ini menjadi penting karena selama ini rumusan pendidikan Islam hanya berhenti pada tataran idealisme atau cita-cita Islam dalam proses pendidikan belum menyangkut pada konsep dasar pendidikan Islam itu sendiri atau bagaimana Islam berbicara tentang pendidikan manusia, urgensi pendidikan bagi manusia, apa yang ingin diraih oleh pendidikan Islam dan seperti profil sumber daya manusia yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam. Berikut ini deskripsi singkat paradigma pendidikan Islam.

1. Paradigma Keilmuan Islam

Posisi pendidikan Islam di Indonesia berjalan pada dua kaki yang bersamaan; pertama mempertahankan pendidikan Islam klasik sebagai upaya melestarikan tradisi-tradisi keilmuan Islam klasik; kedua berjalan mengikuti sistem pendidikan nasional dengan mengajarkan ilmu-ilmu umum. Hal ini terjadi karena pengakuan hasil/produk pendidikan agama harus sejalan dengan UUSPN, karena apabila tidak sesuai dengan aturan pendidikan yang diakui oleh UUSPN, maka produk pendidikan agama tersebut tidak akan diakui legalitasnya dan tidak akan mendapat pengakuan sejajar dengan produk pendidikan umum. Kenyataan ini terjadi karena perbedaan sudut pandangan terhadap sumber keilmuan dari kedua tradisi keilmuan ini.

2. Sumber Ilmu

Dalam khasanah keilmuan Islam tidak dikenal pembagian ilmu (ilmu agama dan ilmu umum), ilmu dunia dan ilmu akherat, karena pada hakekatnya

⁵ Hujair AH. Sanakhy, *Paradigma pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani di Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press kerjasama MSI UII, 2003), hal. 94.

semua ilmu adalah satu yaitu ilmu Allah, dan ilmu Allah terbentang luas di langit dan di bumi dan tidak ada satu pun ilmu-Nya yang tidak mempunyai fungsi dan kemanfaatan (sia-sia). Namun untuk dapat menemukan fungsi dan kegunaannya hanya bisa dilakukan dengan membuat eksperimen atau dipelajari dengan ilmu.

Untuk itu, Islam memandang bahwa semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini adalah sumber ilmu yang harus selalu dikaji dan diobservasi. Ciptaan Allah tersebut dikategorikan menjadi dua, yaitu ciptaan yang berupa *qauliyah* (kalam Allah/perkataan Allah) sebagai “tanda” adanya Allah dan *Kauniyyah* (alam semesta) sebagai “bukti” adanya Allah. Perkataan Allah yang berupa teks Al-Qur’an yang tidak berubah dari dahulu sampai sekarang merupakan tanda (*ayat*) adanya Allah SWT (*existing of God*).

Sementara alam semesta (*kauniyyah*) beserta isinya merupakan sumber ilmu yang akan dapat memandu manusia untuk sampai mendapatkan “bukti” adanya Allah (*proving of God*). Semua ciptaan Allah (*naqliyah dan kauniyyah*) tersebut merupakan obyek kajian manusia yang harus selalu digali melalui observasi, eksperimen dan penalaran logis, yang hasil kajiannya akan menjadi konsep dan apabila telah teruji kebenarannya maka akan menjadi teori dan akhirnya akan menjadi ilmu pengetahuan.

Dengan mempelajari teks al-Qur’an (*qauliyah*) akan diperoleh pengetahuan, bentuknya dapat berupa teori; dan dengan mempelajari semua ciptaan-Nya (*kauniyyah*) bentuknya juga dapat berupa teori. Teori-teori yang didapat dari mempelajari dari Al-Qur’an ini tidak mungkin berlawanan dengan teori-teori yang didapat dari mempelajari kauniyah sebab dua kelompok teori ini adalah teori Tuhan. Ini artinya bahwa pada hakekatnya sumber pengetahuan adalah satu yaitu Allah SWT.⁶

Hal ini berbeda dengan pendekatan ilmu barat yang bersifat empirik artinya bahwa sesuatu dikatakan sebagai ilmu apabila dapat dibuktikan secara empiris (riil/nyata) sehingga suatu ilmu dikatakan benar apabila dapat dibuktikan secara empirik. Sedangkan kebenaran ilmu dalam Islam dapat bersifat mutlak/absolut dan relatif. Kebenaran mutlak/absolut ini hanya pada teks al-Qur’an artinya bahwa kebenaran teks Al-Qur’an sudah tidak diragukan lagi karena

⁶ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Robani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 111.

bersumber dari Tuhan. Sementara selain dari itu, semua kebenarannya bersifat relatif sekalipun melalui penalaran yang logis, observasi dan eksperimen yang hasil kebenarannya bersifat empiris namun kebenaran ilmunya tetap bersifat relatif. Lebih jelasnya tercantum dalam tabel berikut:

	Paradigma	Sumber ilmu	Kebenaran ilmu	Hasil
Islam	Rasional-transenden	naqliyah-kauniyah	Absolute-relative	Terikat nilai
Barat	Rasional Empirik	Aqliyah-empirik	Empirik	Bebas nilai

3. Tujuan Pendidikan menurut Islam

Ada dua profil manusia yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam yaitu manusia yang berkarakteristik :

- a. Abd Allah (Manusia yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah)

Yaitu sebagaimana firman Allah “*Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdikan hidupnya kepada-Ku*”⁷. Untuk menjadi hamba Allah yang sadar akan maksud dan tujuan diciptakannya, maka harus menggunakan ilmu. Dan ilmu yang mampu menghantarkan manusia menjadi manusia-manusia taat kepada Allah adalah ilmu-ilmu agama yaitu ilmu tauhid, al-qur’an, fiqih, hadits yang oleh imam al-Ghozali ilmu-ilmu ini dikategorikan sebagai ilmu *fardhu ‘ain*. Disebut ilmu fardhu ain karena semua orang yang menyatakan diri beriman dan berislam wajib mempelajari ilmu ini. artinya ilmu ini wajib diberikan sebagai ilmu dasar yang akan membekali manusia menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada tuhanNya. karena dengan mempelajari ilmu ini akan dapat membantu dirinya dalam menemukan Tuhannya. Oleh karena itu sebenarnya mempelajari ilmu-ilmu ini merupakan kewajiban umat Islam tanpa kecuali, karena dengan tidak mempelajari ilmu ini justru akan membahayakan bagi dirinya karena akan semakin jauh dari petunjuk-Nya.
- b. *Khalifatullah* (Manusia yang mampu memakmurkan bumi)

Hal itu sebagaimana firman-Nya: *Dan tidaklah kami utus kamu supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam.*⁸ Diutusnya umat manusia (umat Muhammad) di dunia ini supaya dapat memakmurkannya untuk kepentingan umat manusia sebagaimana ditegaskan lagi oleh firman Allah:

⁷ Q.S. az-Zariyat (51) : 56.

⁸ Q.S. al-Anbiya [21]: 107.

Dia-lah yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah supaya dapat memakmurkan dunia ini (untuk kepentingan bersama). Makna khalifah mempunyai dua fungsi yaitu *ilabiyah* sebagai mandataris Tuhan di muka bumi dan *insaniyah* yang tugas utamanya adalah memakmurkan dunia bagi kesejahteraan umat manusia.

Untuk itu supaya mampu menjalankan tugas sebagai khalifah Tuhan di bumi, manusia harus membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang mempunyai kaitan langsung dengan tugas sebagai pemakmur dunia, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Ilmu-ilmu ini termasuk dalam kategori ilmu *fardhu kifayah* yang maksudnya ilmu ini bukan kewajiban semua orang namun hanya wajib dituntut oleh orang tertentu yang mempunyai minat khusus di bidang. Dengan dasar pemikiran bahwa tidak mungkin di dunia ini mewajibkan semua manusia untuk mempelajari ilmu tertentu yang akhirnya mempunyai keahlian yang sama. Pengharusan mempelajari ilmu tertentu bagi semua manusia berarti melanggar *sunatullah* karena dalam kehidupan sosial manusia dapat saling mengisi dengan berbagai keahlian ilmu seperti apabila ada yang sakit maka harus berobat kepada manusia yang mempunyai keahlian kedokteran.

Mengingat bahwa ilmu dalam kategori *fardhu kifayah* ini sifatnya khusus yang hanya dipelajari oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kecenderungan atau minat khusus di bidang itu, maka yang termasuk kategori ilmu-ilmu *fardhu kifayah* ini adalah ilmu kedokteran, tehnik, pertanian, hukum dan sebagainya yang termasuk dalam bidang kajian ilmu humaniora, Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, sehingga orang yang mempelajari ilmu ini akan menjadi pribadi profesional di bidangnya. Dengan semakin tinggi tingkat profesionalitasnya maka akan membawa manusia kepada derajat yang berbeda-beda. Kalau ilmu *fardhu 'ain* dipelajari untuk kepentingan pribadi dalam upaya menjadi hamba Allah (*Abd Allah*) yang taat kepada-Nya, maka ilmu *fardhu kifayah* dipelajari untuk kepentingan pribadi (*skilled person*) dan masyarakat yaitu keahlian yang dikuasainya dapat digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Inilah fungsi manusia sebagai mandataris Tuhan di muka bumi (*khalifatullah fil ardh*).

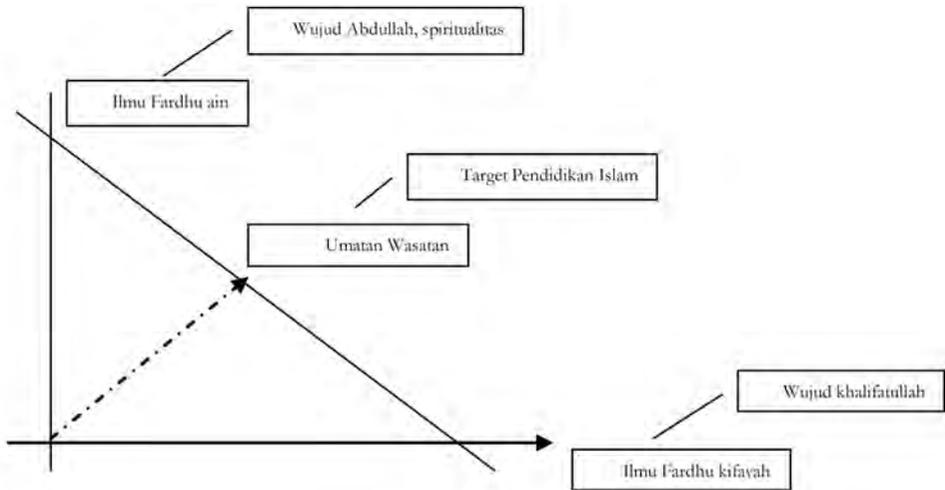
Harapan yang ingin dicapai oleh pendidikan islam adalah manusia yang memiliki dua kemampuan keilmuan (*fardhu ain dan fardhu kifayah*). Dengan menguasai ilmu *fardhu ain* akan mengantarkan manusia menjadi pribadi yang penuh ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT yang akan membawa kebahagiaan di akherat, sementara dengan menguasai ilmu *fardhu kifayah* akan mengantarkan manusia menjadi pribadi yang memiliki keahlian dan dengan keahliannya akan dapat dijadikan profesi dan dengan profesinya akan menjadikannya profesional dan dengan keprofesionalannya akan mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan hidup di dunia. Berikut adalah paradigma keilmuan pendidikan Islam:

Karakteristik	Ilmu yang dibutuhkan	Kategori ilmu	Tujuan ilmu	Fungsi ilmu	Hasil Pendidikan Islam
Abdullah	Ilmu Fardhu ain (wajib dipelajari semua orang mukmin dan muslim)	Ilmu-ilmu agama: Tauhid, al-Quran, hadits, fiqh	Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa	Pribadi	Ummatan Wasatan/khairul ummah/manusia seutuhnya
Pendidikan Islam	➡	➡	➡	➡	
Khalifatullah	Ilmu Fardhu Kifayah (Wajib dipelajari hanya yang mempunyai bakat dan minat khusus)	Ilmu-ilmu umum/duniawi	Menjadi manusia yang profesional	Pribadi dan Sosial (kesejahteraan manusia)	

4. Idealisme pendidikan Islam

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Pendidikan Islam beranjak dari dua tujuan dan target dasar yang dicapai yaitu membentuk manusia yang memiliki karakteristik *abdullah* dan *khalifatullah*, maka cara untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembedangan ilmu dengan tugas, sifat dan fungsi masing-masing dengan hasil yang ingin diwujudkan adalah menjadi umat yang seimbang (*ummatan wasatan*) yaitu umat muslim yang mampu menguasai ilmu secara berimbang anatara ilmu agama dan ilmu umum.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kedalaman ilmu agama yang diperoleh melalui ilmu-ilmu *fardhu ain* akan mempengaruhi tingkat kualitas penguasaan ilmu *fardhu kifayah* untuk dapat diamalkan demi kesejahteraan umat manusia. Idealisme pendidikan Islam dapat dilihat pada grafik berikut:



Menurut grafik di atas dapat dijelaskan bahwa target output yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam adalah manusia yang memiliki kemampuan keilmuan yang seimbang baik ilmu umum (*ilmu fardhu ain*) dan ilmu agama (*ilm fardh kifayah*). Ilmu-ilmu fardhu ain berfungsi sebagai sarana peningkatan keimanan manusia kepada Tuhannya yang terimplikasi dalam kesatuan hidup yang didasari nilai-nilai ilahiyah, sementara ilmu fardh kifayah berfungsi sebagai sarana pengembangan kualitas kehidupan dan sosial kemasyarakatan.

Jadi, profil manusia yang seimbang (*ummatan wasatan*) menurut pendidikan Islam adalah ketinggian ilmu agama yang terwujud dalam totalitas kehidupan keagamaan akan semakin tinggi menumbuhkan kesadaran dalam pengembangan ilmu dan tehnologi yang disinari nilai-nilai agama untuk kepentingan kemudahan dan kesejahteraan umat manusia sebagai fungsi pengejawantahan *khalifatullah fil ardh*.

D. Penutup

Era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi dan informasi dan perdagangan bebas antar negara telah menjadi problematika sendiri bangsa kita apalagi dengan telah banyak disepakati kesepakatan internasional perdagangan bebas dunia dalam AFTA/NAFTA dan yang terakhir para anggota WTO telah menyepakati GATS (*General Agreement on Trade in Service*) memunculkan kekhawatiran siapkah pendidikan kita menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi/kompetitif, padahal dari segi mutu dan kualitas pendidikan kita masih jauh di bawah bangsa lain dan negara ASEAN.

Penetapan UUSPN sesungguhnya merupakan jawaban dari upaya bangsa kita untuk mengejar ketinggalan dengan bangsa lain tersebut, namun dalam taraf implementasinya masih jauh dari semangat dan harapan UU yaitu masih ditemuinya persoalan klasik pembagian keilmuan (dikhotomi keilmuan) padahal globalisasi tidak mengenal dikhotomi yang ada adalah kualitas dan kompetensi keilmuan. Pendidikan Islam sejak awal lahir sebagai pendidikan non dikhotomik sehingga dengan adanya pembagian keilmuan justru menempatkannya pada tempatnya yang khusus yaitu hanya pada wilayah ilmu-ilmu agama. Sementara ilmu-ilmu umum menjadi wilayah kajian ilmu-ilmu empiris.

Pada tataran realitasnya kedua bidang keilmuan seakan-akan sulit diintegrasikan. Padahal menurut Islam kedua ilmu tersebut saling terkait dan terintegrasi dalam nilai-nilai kesatuan sebagai akibat mempelajari ilmu Allah. Dalam konteks pendidikan Islam sudah saatnya merumuskan kembali paradigma keilmuan yang melandasi seluruh sistem pendidikan dalam satu kesatuan ilmu yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 2007. "Pendidikan Islam di era Globalisasi : Peluang dan Tantangan", makalah disampaikan dalam *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-7* di Pekanbaru, 21-24 November.
- . 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bakar, Osmah. 1992. *Classification of knowledge in Islam*. Kuala Lumpur: Institute for Policy Research MARA.
- Sanakhy, Hujair AH. 2003. *Paradigma pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani di Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insani Press kerjasama MSI UII.
- Tafsir, Ahmad. 2006. *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Watt. H.M. 1984. *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghozali*. Ttp: Endinburgh University Press.